



PEMERINTAH PROVINSI BALI RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2021



DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH



PEMERINTAH PROVINSI BALI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

JL. D.I. PANJAITAN NITI MANDALA RENON DENPASAR
TELP. (0361) 225091, FAX (0361) 224557
Website : www.diskopukm.baliprov.go.id email : diskopukm@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BALI

NOMOR : 914/021/DISKOP/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BALI TAHUN 2021

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 125 huruf a, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a perlu membentuk Tim Teknis Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4871);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Nomor 43 tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 4);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah .
15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
17. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021(Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11);
19. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2009 tentang Penugasan Kepada Pimpinan Perangkat Daerah untuk Menandatangani Keputusan tentang Pembentukan Tim/Panitia dan Kelompok Kerja di Lingkungan Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Menghimpun materi-materi yang terkait dengan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali;
 - b. mengolah materi-materi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan menyusun Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
 - c. menyampaikan hasil dokumen Rencana Kerja kepada Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali; dan
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 15 Januari 2020

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI BALI



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan)
2. Kepala Bappeda Provinsi Bali di Denpasar
3. Inspektur Provinsi Bali di Denpasar
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Bali di Denpasar

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BALI

NOMOR : 914/021/DISKOP/2020

TANGGAL 15 Januari 2020

TENTANG,

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUNAN
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
PROVINSI BALI

Susunan Keanggotaan Tim Teknis Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- Penanggung Jawab : Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
- Ketua : Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
- Sekretaris : Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
- Anggota :
1. Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
 2. Kepala Bidang Pemberdayaan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
 3. Kepala Bidang Pengawasan Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
 4. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
 5. Kepala UPT Diklat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Bali
 6. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
 7. Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

8. Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan UPT Diklat Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
9. I Gusti Agung Angga Nuriana, S.T. Staf Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.
10. Ni Luh Nyoman Ayu Tirta Wiratni, S.E. Staf Sub Bagian Penyusunan Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.



KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL
DAN MENENGAH PROVINSI BALI

[REDACTED]
I WAYAN MARDIANA
NIP. [REDACTED]

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa, atas asung kerta wara nugrahaNya kami dapat menyelesaikan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan kelanjutan upaya pembangunan yang terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali. Mengamati pelaksanaan Program dan kegiatan dari tahun ke tahun, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan.

Menyadari bahwa optimalisasi usaha pembangunan dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah memerlukan dukungan berbagai pihak, maka keberadaan Renja ini sengaja kami jabarkan secara terinci dalam rangka memperoleh masukan serta gagasan yang lebih perspektif bagi keberhasilan tugas-tugas dibidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada khususnya serta keberhasilan pembangunan di Provinsi Bali sebagai bagian dari pembangunan nasional.

Akhirnya seraya mengharapkan sumbangan pemikiran dari kita semua maka Renja yang telah disusun ini kami ajukan sebagai dasar Perencanaan Program pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali guna menjadi landasan operasional dalam melaksanakan program/kegiatan Tahun 2021.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	7
Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun Lalu	11
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali	11
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	22
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali.....	28
2.4. Reviu terhadap Rancangan Renja	33
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	34
Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	36
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	37
3.3. Program dan Kegiatan	38
Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	39
Bab V Penutup	40
Lampiran	

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1. Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- Tabel 2.2. Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Golongan
- Tabel 2.3. Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Berdasarkan Jabatan-jabatan Struktural
- Tabel 2.4. Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
- Tabel 2.5. Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019
- Tabel 2.7. Pengukuran Kinerja
- Tabel 2.8. Target dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang profesional dan Akuntabel
- Tabel 2.9. Capaian RAT Kabupaten/Kota se-Bali
- Tabel 2.10. Target dan Realisasi Kontribusi UMKM dalam Perekonomian
- Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019
- Tabel 2.12. Tujuan, Target dan Indikator TPB/SDGs Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
- Tabel 2.13. Usulan Program/Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Bali
- Tabel 3.1. Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Secara hierarki penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana kerja Pemerintah Daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD). Karenanya, sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali merupakan bahan masukan untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Bali Tahun 2021. Melalui Forum Perangkat Daerah, Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali disempurnakan menjadi Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali; Rancangan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali selanjutnya sebagai bahan Musrenbang RKPD. Setelah RKPD ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah, maka Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali disempurnakan selanjutnya dikirim Kepada Bappeda Provinsi Bali untuk diverifikasi. Bila hasil verifikasi dari Bappeda Provinsi Bali memandang bahwa Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sinkron dengan RKPD Tahun 2021, maka Bappeda Provinsi Bali mengirim Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali ke Gubernur melalui Sekretariat Daerah

untuk ditetapkan menjadi Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 selanjutnya menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021.

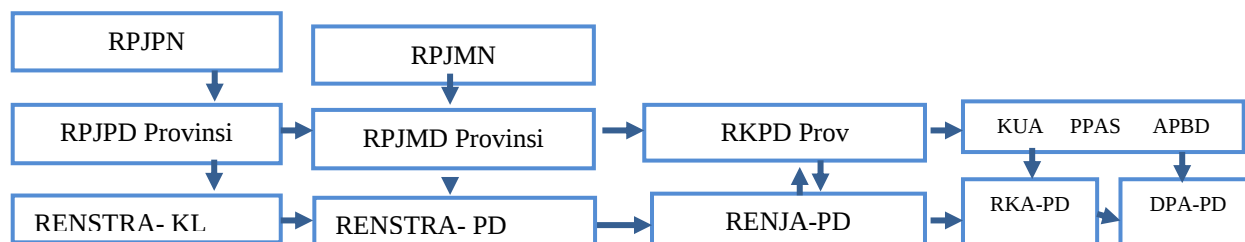
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali merupakan suatu lembaga yang berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali memiliki rincian tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan daerah, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya. Sedangkan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi serta penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. ruang lingkup perencanaan pembangunan nasional dan dokumen perencanaan terdiri atas Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN), Rencana Strategis Kementerian/Lembaga, Rencana Kerja Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Sejalan dengan payung hukum perencanaan di tingkat pusat, maka dokumen Perencanaan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah

(Renstra PD), dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Diagram 1.1

Hubungan Dokumen Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dengan Dokumen Perencanaan Lainnya



1.2. Landasan Hukum

Peraturan perundangan-undangan yang mendasari penyusunan Rancangan Akhir Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 adalah :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah);
 - 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 - 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 - 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 - 11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, LKPD Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

- 14) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
- 15) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang *Masterplan* Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 16) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- 17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
- 20) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangangan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);

- 22) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2005-2025;
- 23) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023;
- 24) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 11);
- 25) Peraturan Gubernur Bali Nomor 79 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Provinsi Bali;
- 26) Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021;
- 27) Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Bali Nomor 2712 Tahun 2020 tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Sebagaimana diuraikan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah wajib sinkron dengan RKPD maka maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 adalah menjabarkan Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2018-2023 khususnya Rencana Kerja Tahun 2021 serta sebagai bahan masukan pada penyusunan RKPD Provinsi Bali Tahun 2021 dan setelah RKPD ditetapkan maka Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 akan disesuaikan pada RKPD tersebut.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 adalah :

- 1) Menjabarkan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023 terutama pada tahun 2021.

- 2) Merancang program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2021.
- 3) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 dengan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2018-2023.
- 4) Sinkronisasi program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 dengan RKPD tahun 2021.
- 5) Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 disusun untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan evaluasi capaian indikator kinerja Renstra dalam rangka pencapaian target kinerja.
- 6) Tujuan tersusunnya Rencana Kerja ini adalah untuk menjamin konsistensi keberlanjutan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan memberikan pedoman bagi seluruh bidang dan UPTD lingkup Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam melaksanakan program/kegiatan untuk mencapai target sasaran Renstra yang telah ditetapkan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Renja agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar belakang

mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan hukum

memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renja, baik yang berskala nasional maupun daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen Renja terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab didalamnya.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini dibagi menjadi empat bagian pembahasan, yaitu :

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra

SKPD, memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja SKPD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007. Indikator yang dikaji disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah, memuat uraian-uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampak capaian visi dan misi kepala daerah terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang, serta formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk

ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2021, memuat telaahan terhadap Rancangan Awal RKPD untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat Daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah.

2.5. Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat, memuat kajian atas program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini pembahasan dibagi menjadi beberapa pembagian pembahasan, yaitu:

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional, memuat telaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah, pada bagian ini tujuan dan sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3. Program dan Kegiatan, pada bagian ini, program dan kegiatan dirumuskan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam pembangunan daerah.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menguraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan maupun dalam kondisi ketidaksesuaian antara ketersediaan anggaran dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu 2019 (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan 2020 (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah (tolok ukur menggunakan Renstra Perangkat Daerah Periode 2018-2023 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2019 melaksanakan Urusan Pemerintahan yaitu Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar. Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah merupakan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, maka Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tetap dinyatakan sebagai Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah:

- a. Tugas pokok Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain :

- Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan daerah
 - Melaksanakan tugas Dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.
- b. Dalam pelaksanaan tugas tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mempunyai fungsi :
- Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
 - Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan Provinsi
 - Penyelenggaraan administrasi Dinas bidang koperasi, usaha kecil dan menengah
 - Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Dinas
 - Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan data tahun 2019, komposisi kepegawaian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah :

Tabel 2.1
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1	Strata 3	-
2	Strata 2	25
3	Strata 1	16
4	Diploma III	1
5	Diploma II	-
6	SLTA / Sederajat	13
7	SLTP / Sederajat	-
8	SD	-
Total		55

Tabel 2.2
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Jumlah (Orang)
1	Golongan IV	13
2	Golongan III	35
3	Golongan II	7
4	Golongan I	-
Total		55

Tabel 2.3
Pegawai Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Berdasarkan Jabatan-Jabatan Struktural

No.	Eselon	Jumlah (Orang)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	5
3	Eselon IV	18
Total		25

Tabel 2.4
Aset Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

NO	URAIAN ASET/MODAL	UKURAN
1	Tanah	6,530 m2
2	Gedung dan Bangunan (Buah/Unit)	4 unit
3	Kendaraan Operasional Roda 4	11 unit
4	Kendaraan Operasional Roda 2	27 unit
5	Meja Kerja	107 buah
6	Kursi Kerja	66 buah
7	Komputer	32 unit
8	Printer	24 unit
9	Filling Cabinet	24 unit
10	Lemari Besi/Kayu	29 unit
11	Rak Kaca/Kayu	25 unit
12	Air Conditioner (AC)	56 unit
13	Alat Kantor Lainnya	29 set
14	Zice	1 unit
15	Alat-alat Rumah Tangga/Lain-lain	11 unit

Pada tahun 2019 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam upaya mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Bali yang tertuang pada RPJMD Provinsi Bali periode 2018-2023 dengan Visi :

“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI ” Implementasi Pola Pembangunan Semesta Berencana dalam mewujudkan Bali Era Baru dengan mengemban 1 (satu) misi yaitu :

“Mengembangkan industri kecil dan menengah berbasis budaya (branding Bali) untuk memperkuat perekonomian Krama Bali” (Misi 17)

Mengacu pada visi dan misi Kepala Daerah tersebut di atas, maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali mengacu pada misi tersebut dengan tujuan terwujudnya pemerataan pertumbuhan ekonomi Bali dan berkembangnya perekonomian berbasis budaya Bali dengan sasaran meningkatnya daya saing ekonomi lokal serta meningkatnya pusat-pusat perekonomian kecil dan menengah krama Bali untuk mencapai tujuan adanya Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali dengan strategi melalui pemberdayaan dan pengembangan koperasi dan UMKM, dengan arah kebijakan peningkatan daya saing Koperasi dan UMKM. Dalam upaya mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut maka Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang melaksanakan bidang urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Renstra Perangkat Daerah periode 2018-2023 menetapkan 1 (satu) tujuan dan 2 (dua) sasaran strategis.

Tujuan pada Renstra yaitu Meningkatkan Kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) dengan sasaran terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Profesional dan Akuntabel dan Meningkatkan Ketangguhan dan Kemandirian Wirausaha dari Pelaku UMKM .

Provinsi Bali dalam urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya mewujudkan visi dan misi Provinsi Bali dalam Renja 2021 merencanakan melaksanakan 8 (delapan) program dan 17 (tujuh belas) kegiatan dan 47 (empat puluh tujuh). Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 sebagai hasil pelaksanaan Renstra tahun keempat akan diuraikan secara berikut:

Tabel 2.5.
Realisasi Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja	2.160.141.725,00	2.063.513.001,00	95,45	Nilai LKjIP	82.15	100	100	100
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.260.000,00	1.260.000,00	100,00	Jumlah materai yang disediakan	lembar	250	250	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	210.000.000,00	176.855.265,00	84,22	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik	jenis	3	3	100
3	Penyediaan Alat Tulis Kantor	50.500.000,00	46.984.000,00	93,04	Jumlah jenis alat tulis kantor	jenis	37	37	100
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.000.000,00	14.948.500,00	99,66	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	jenis	2	2	100
5	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000,00	9.972.500,00	99,73	Jumlah jenis instalasi listrik	jenis	7	7	100
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.000.000,00	27.000.000,00	100,00	Jumlah jenis bahan bacaan	jenis	12	12	100
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	12.250.000,00	11.830.000,00	96,57	Jumlah jenis makanan dan minuman	jenis	2	2	100
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam daerah	299.376.000,00	264.242.510,00	88,26	Jumlah jenis perjalanan dinas	jenis	2	2	100
9	Upacara Keagamaan	75.000.000,00	74.950.000,00	99,93	Jumlah jenis upacara keagamaan	jenis	18	18	100
10	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	356.399.828,00	338.640.976,00	95,02	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	jenis	3	3	100

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	Pemeliharaan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25.000.000,00	24.995.000,00	99,98	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	Jenis peralatan kantor	2	2	100
12	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor	429.494.066,00	429.493.367,00	99,99	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	jenis	3	3	100
13	Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas	532.508.932,00	530.840.288,00	99,69	Jumlah jenis kendaraan dinas	jenis	2	2	100
14	Penyusunan, perencanaan, dan pelaporan capaian kinerja	116.352.899,00	111.500.595,00	95,83	Jumlah dokumen perencanaan	dokumen	2	2	100
II	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	368.001.166,00	356.016.956,00	96,74	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	unit	210	210	100
15	Penilaian Kesehatan Koperasi	166.739.466,00	163.378.548,00	97,57	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	unit	135	135	100
16	Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi	110.231.900,00	107.552.410,00	90,96	Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi	unit	50	50	100
17	Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	91.029.800,00	85.085.998,00	93,47	Jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	unit	25	25	100
III	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi	507.228.563,00	489.432.416,00	96,49	Jumlah kelompok masyarakat/anggota koperasi yang mendapat penyuluhan dan jumlah koperasi yang ijinnya diverifikasi	unit	50	50	100
18	Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	124.154.199,00	119.318.495,00	96,11	Terlaksananya pemutakhiran data koperasi	unit	20	20	100
19	Penyuluhan dan Pengembangan Koperasi	225.700.898,00	218.070.161,00	96,62	Penumbuhan dan pengembangan koperasi	unit	17	17	100
20	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	157.373.466,00	152.043.760,00	96,61	Peningkatan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	unit	15	15	100

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	394.846.166,00	357.013.291,00	90,42	Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	unit	104	104	100
21	Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi	223.682.100,00	200.743.298,00	89,74	Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	unit	50	50	100
22	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	74.632.100,00	73.187.482,00	98,06	Jumlah koperasi yang bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta	unit	50	50	100
23	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	96.531.966,00	83.082.511,00	86,07	Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	unit	4	4	100
V	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	927.111.863,00	897.270.130,00	96,78	Jumlah UMKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya dan jumlah KUMKM yang mendapat pendampingan konsultan PLUT	UMKM	50	50	100
24	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	70.417.100,00	68.636.398,00	97,47	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	UMKM	50	50	100
25	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	773.432.663,00	751.196.184,00	97,12	Jumlah UMKM yang melakukan kemitraan dan difasilitasi pameran	UMKM	104	104	100
26	Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM	60.417.100,00	57.215.648,00	94,70	Jumlah UKM yang memahami HCPM/HKI	UMKM	25	25	100
27	Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	22.845.000,00	20.221.900,00	88,52	Jumlah UMKM yang mendapat akses pembiayaan	UMKM	25	25	100
VI	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM	5.731.279.349,00	5.483.140.505,00	95,67	Jumlah SDM KUKM yang berkompeten	UMKM	50	50	100
28	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM	109.018.199,00	108.897.145,00	99,89	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM	UMKM	50	50	100
29	Penyediaan jasa surat menyurat	315.000,00	315.000,00	100,00	Jumlah materai	lembar	75	75	100
30	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	35.910.000,00	17.710.166,00	49,32	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik	Jenis	3	3	

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran			Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)				
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Narasi	Satuan	Kinerja		
							Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
31	Penyediaan Alat Tulis Kantor	3.939.000,00	3.784.800,00	96,09	Jumlah jenis ATK	Jenis	28	28	100
32	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1.260.000,00	1.041.000,00	82,62	Jumlah lembar foto copy	lembar	6.300	6.300	100
33	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.027.000,00	2.027.000,00	100,00	Jumlah jenis instalasi listrik	Jenis	10	10	100
34	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	840.000,00	840.000,00	100,00	Jumlah jenis bahan bacaan	Jenis	1	1	100
35	Penyediaan Makanan dan Minuman	2.625.000,00	2.275.000,00	86,67	Jumlah jenis makanan dan minuman	Jenis	2	2	100
36	Upacara Keagamaan	18.000.000,00	17.793.750,00	98,85	Jumlah jenis upacara keagamaan	Jenis	5	5	100
37	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	162.458.051,00	162.305.125,00	99,91	Jumlah jenis jasa pemeliharaan dan kebersihan gedung kantor dan jasa keamanan	Jenis	3	3	100
38	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	43.572.099,00	43.031.992,00	98,76	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	Jenis	2	2	100
39	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	7.525.000,00	7.366.000,00	97,89	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Jenis	4	4	100
40	Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM	6.000.000,00	5.844.500,00	97,41	Laporan rapat konsolidasi dan penyusunan program diklat SDM KUMKM	Dokumen	1	1	100
41	Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	5.337.790.000,00	5.109.909.027,00	95,73	Jumlah pengurus, pengawas dan pengelola KUKM yang mengikuti diklat peningkatan kapasitas koperasi dan UKM	Orang	1.470	1.470	100
	JUMLAH PROGRAM : 6								
	JUMLAH KEGIATAN : 41	10.088.608.832,00	9.646.386.245,00	95,62					

Beberapa hal penting dalam Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2019 dan Capaian Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2019 (dapat dilihat pada lampiran 1 tabel 2.6.) adalah :

a. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Dari 6 (enam) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan, realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan sebanyak 6 (enam) program dan 41 (empat puluh satu) kegiatan yaitu :

1. Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja

- a) Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- b) Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- c) Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
- d) Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- e) Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- f) Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- g) Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman
- h) Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar dan Dalam Daerah
- i) Kegiatan Upacara Keagamaan
- j) Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
- k) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- l) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
- m) Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas
- n) Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan Capaian Kinerja

2. Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi

- a) Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi

Faktor yang mempengaruhi capaian tersebut adalah pelaku KUMKM dalam mengakses permodalan tersebut memanfaatkan program yang diluncurkan Pemerintah Pusat yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pemanfaatan KUR tersebut oleh KUMKM karena mendapat informasi secara terus menerus oleh Pemerintah Daerah melalui sosialisasi dan bimbingan teknis pengajuan proposal usaha. Dukungan capaian indikator kinerja tersebut melalui pelaksanaan Program Penciptaan Iklim Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang Kondusif pada kegiatan Perencanaan, Koordinasi dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil Menengah.

- b) Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha
- c) Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi

3. Program Peningkatan Pengawasan Koperasi

- a) Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi
- b) Kegiatan Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi
- c) Kegiatan Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi

4. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi

- a) Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
- b) Kegiatan Penyuluhan dan Pengembangan Koperasi
- c) Kegiatan Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi

5. Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

- a) Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah
- b) Kegiatan Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Kecil Menengah

- c) Kegiatan Kemitraan Koperasi di bidang Produksi dan Aneka Usaha
- d) Kegiatan Perlindungan dan Pembinaan UKM
- e) Kegiatan Pengembangan Jaringan Usaha dan Promosi Produk Unggulan Koperasi
- f) Kegiatan Pelatihan Manajemen Pengelola Koperasi/KUD
- g) Kegiatan Diklat Peningkatan Kapasitas SDM KUKM

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali melaksanakan 6 (enam) program dengan 29 (dua puluh sembilan) kegiatan yang didukung oleh dana sebesar Rp10.088.608.832,00 (Sepuluh milyar delapan puluh delapan juta enam ratus delapan ribu delapan ratus tiga puluh dua rupiah). Realisasi dana Tahun 2019 sampai dengan 31 Desember 2019 adalah Rp9.646.386.245,00 (Sembilan milyar enam ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu dua ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 95,62% sedangkan realisasi fisik sebesar 99,32%. Jadi dengan realisasi dana sebesar 95,62% dengan pencapaian target program 99,32% bisa dikatakan efektif dalam mencapai target dari masing-masing program.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Kinerja ini berdasarkan atas laporan Penyusunan LKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019 yang didasarkan kepada pengukuran dan evaluasi pelaksanaan atas Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengukuran kinerja ini dilakukan terhadap kegiatan Tahun Anggaran 2019, dengan cara membandingkan antara rencana kinerja dengan realisasi ditinjau dari aspek input, output dan outcome yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja. Selain itu pengukuran kinerja juga dilakukan terhadap sasaran strategis dengan mengukur pencapaian indikator sasaran yang telah ditargetkan dibandingkan dengan realisasinya. Pengukuran terhadap kinerja kegiatan dituangkan ke dalam formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK).

Capaian kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2019 memuat capaian target-target yang terukur dari perolehan masing-masing indikator-indikator kinerja. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.7. Pengukuran Kinerja

Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun Berjalan			Kriteria	Kode
			Target	Realisasi	Capaian %		
1	2	3	4	5	6	7	8
1 Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1 Persentase koperasi yang aktif dan RAT	%	87,98%	78,85%	89,62	Tinggi	
	2 Persentase peningkatan produktivitas koperasi berbasis produk lokal	%	4,20%	8,15%	194,05%	Sangat Baik	
2 Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis sentra di sektor-sektor unggulan daerah	1 Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB	%	11	-	-	Data belum dapat dipenuhi	

1. Sasaran

- Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel

Tabel 2.8. Target dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Tata kelola Organisasi dan Kinerja Koperasi yang Professional dan Akuntabel

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2018			Target Akhir Renstra 2023	Capaian 2019 terhadap target akhir Renstra (%)
	Target	Realisasi	%		
1	3	4	5	6	7
1. Persentase Koperasi yang aktif dan RAT	87,98%	78,85%	89,62		
2. Persentase peningkatan produktivitas koperasi berbasis produk lokal	4,20%	8,15%	190,05		

Realisasi sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2019 “Persentase koperasi yang aktif dan RAT” adalah 78,85% dari target sebesar 87,98% dengan persentase pencapaian sasaran strategis adalah sebesar 89,62%. Dalam perhitungan indicator “**Persentase Koperasi yang Aktif dan RAT**” perhitungan yang digunakan adalah :

$$\frac{\text{Jml Koperasi yang RAT}}{\text{Total Jumlah Koperasi}} \times 100\%$$

Tabel 2.9. Capaian RAT Kabupaten/Kota Se-Bali

No	Kabupaten/Kota	Koperasi Aktif			Sudah RAT	
		Baru	Wajib RAT	Jumlah	2019	
					Jumlah	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kab. Jembrana	1	206	207	179	86,89%
2	Kab. Tabanan	15	403	418	354	87,84%
3	Kab. Badung	22	477	499	386	80,92%
4	Kab. Gianyar	11	942	953	801	85,03%
5	Kab. Klungkung	9	106	115	92	86,79%
6	Kab. Bangli	6	185	191	162	87,57%
7	Kab. Karangasem	10	203	213	181	89,16%
8	Kab. Buleleng	10	309	319	234	75,73%
9	Kota Denpasar	24	874	898	416	47,60%
	Binaan Provinsi	20	172	192	156	90,70%
	Jumlah	128	3.877	4.005	2.961	76,37%

Sebagaimana diuraikan di atas indikator sasaran strategis tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan disebabkan karena adanya beberapa faktor dalam upaya pencapaian Indikator **"Persentase Koperasi yang Aktif dan RAT"**, faktor tersebut antara lain :

1. Pembubaran koperasi sebanyak 205 koperasi

Usulan pembubaran sebanyak 205 koperasi dilaksanakan sesuai dengan program "Nawa Cita" yaitu **Rehabilitasi Koperasi** dimana program tersebut dilakukan untuk pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutahiran data dan pembekuan, yang akan ditindak lanjuti dengan pembubaran koperasi, dengan kata lain koperasi yang tidak aktif, bermasalah dan tidak terdata akan ditindaklanjuti dengan tidak akan diperpanjang badan hukumnya, sehingga kualitas koperasi yang ada dapat ditingkatkan bukan hanya kuantitasnya saja.

2. Adanya penurunan kinerja koperasi dari yang aktif menjadi pasif (tidak aktif) dari tahun 2018-2019

Realisasi sasaran strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali 2019 **"Persentase peningkatan produktivitas koperasi berbasis produk lokal"** adalah 8,15% dari target sebesar 4,20% dengan persentase pencapaian sasaran strategis adalah sebesar 190,05%. Peningkatan produktivitas koperasi berbasis produk lokal adalah upaya yang ditujukan untuk memberikan kemampuan usaha ekonomi, meningkatkan produktifitas kerja, meningkatkan penghasilan dan menciptakan kemitraan usaha yang saling menguntungkan antar pelaku usaha. Melalui pembinaan dan pengembangan sektor koperasi diharapkan upaya peningkatan usaha ekonomi produktif akan lebih efisien dan dapat mencapai target yang telah ditentukan. Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung pencapaian target peningkatan produktifitas koperasi antara lain :

- a. Peningkatan akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi dengan aktifitas Temu konsultasi dengan narasumber dari PT. Bahana Artha Ventura yang

membahas tentang tata cara koperasi memperoleh permodalan untuk meningkatkan produktivitas koperasi tersebut.

- b. Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha adalah aktifitas berupa Temu Kemitraan Koperasi antara Koperasi Produksi dengan BUMN/BUMD/Swasta untuk menjalin suatu kerja sama atau membahas tata cara atau kiat pengusaha dalam hal produksi dan pemasaran produk unggulan.
- c. Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi adalah kegiatan berupa pameran yang mengikutsertakan koperasi yang memiliki potensi dan produk unggulan yang akan difasilitasi pameran.
- b. Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian melalui pengembangan komoditas berbasis sentra di sektor-sektor unggulan daerah.

Tabel 2.10. Target dan realisasi kontribusi UMKM dalam perekonomian

Indikator Kinerja	Capaian Tahun 2019			Target Akhir Renstra 2023	Capaian 2019 terhadap target akhir Renstra (%)
	Target	Realisasi	%		
1	3	4	5	6	7
1. Persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB	11	-	-	13%	-

Tolak ukur keberhasilan UMKM dalam perekonomian daerah adalah kontribusi UMKM terhadap PDRB namun, perhitungan tersebut dilaksanakan oleh Lembaga lain yaitu (BPS dan BAPPEDA) namun lembaga tersebut belum memiliki data rinci mengenai kontribusi UMKM dan data yang tersedia adalah data kontribusi usaha persektor ekonomi yang artinya data tersebut tidak sah menjadi tolak ukur keberhasilan UMKM dikarenakan data UMKM sudah terhitung dengan perusahaan besar dalam hal ini kontribusinya pastilah lebih besar dari total kontribusi persektor ekonominya. Walaupun demikian Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tetap berusaha dalam pemenuhan capaian indikator tersebut karena telah tertuang dalam perjanjian kinerja, untuk memenuhi capaian indikator

tersebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah telah menjalin kerjasama dengan Badan Pusat Statistik untuk merumuskan data yang ada untuk mencari seberapa kontribusi UMKM dalam perekonomian, namun hal tersebut baru akan dilaksanakan pada tahun 2020 dan untuk data 2019 tidak dapat ditampilkan untuk saat ini, tetapi akan ditampilkan ditahun 2021 bersamaan dengan data kontribusi UMKM tahun 2020. Selain hal tersebut diatas Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tetap melaksanakan kegiatan untuk mendukung pencapaian kontribusi UMKM tersebut dengan upaya penumbuhan UMKM baru, fasilitasi perijinan IUMK dan HKI, fasilitasi Permodalah serta fasilitasi pameran dalam maupun luar daerah sehingga pelaku UMKM terus meningkatkan kelas usahanya yang otomatis memberikan kontribusi terhadap perekonomian daerah.

Pencapaian sasaran tersebut di atas didukung anggaran APBD Provinsi Bali Tahun 2019 sebesar Rp. 10.088.608.832 atau sekitar 50,58% dari dana keseluruhan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali yaitu sebesar Rp. 19.946.333.683 Realisasi anggaran untuk pencapaian sasaran tersebut sebesar Rp. atau 95,62 % dari target Rp. 10.088.608.832 sedangkan anggaran pendukung terealisasi sebesar Rp. 2.063.531.001 atau 95,53% dari target Rp. 2.160.141.725 Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang cukup baik dan diikuti dengan penyerapan anggaran 95,62% menunjukkan bahwa dana yang disediakan untuk pencapaian sasaran pembangunan tahun 2019 telah mencukupi. Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2019 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan padat tabel berikut:

Tabel 2.11. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2019

No	Sasaran	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	% Realisasi
1	Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja koperasi yang professional dan akuntabel	1.270.075.107	1.202.462.609	94,68
2	Meningkatnya kontribusi UMKM dalam perekonomian	927.111.863	897.270.130	96,78
	Anggran Program pendukung dua buah sasaran Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM (+ Dana DAK)	5.731.297.349	5.483.140.505	95,67
	Jumlah	7.928.485.107	7.582.873.244	95,64
	Belanja Langsung Pendukung	2.160.141.725	2.063.531.001	95,53
	Total Belanja Langsung	10.088.608.832	9.646.386.245	95,62

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berdasarkan gambaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali, Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (SDGs) bagi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dan identifikasi masalah tersebut di atas, selanjutnya diidentifikasi isu strategis sebagai berikut :

a. Rehabilitasi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Pembaharuan organisasi koperasi melalui pemutakhiran data dan pembekuan, akan ditindaklanjuti dengan pembubaran koperasi.

b. Pengembangan KUKM

Dilaksanakan secara bertahap dan terukur melakukan peningkatan dan pengembangan kapasitas usaha dan kelembagaan koperasi untuk mendorong menjadi koperasi skala besar internasional.

c. Re-Orientasi KUKM

Mengubah paradigma dari pendekatan kuantitas menjadi kualitas kelembagaan koperasi

Isu strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali antara lain :

1. Masih rendahnya daya saing dan produktivitas koperasi dan UMKM di Bali.
2. Rendahnya profesionalisme dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
3. Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUMKM sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan dalam peningkatan kelas usaha koperasi dan UMKM.
4. Pengembangan ekonomi berbasis keunggulan daerah.
5. Masih terbatasnya akses koperasi dan UKM dalam pembiayaan dan permodalan.
6. Masih kurangnya kerjasama kemitraan ekonomi dan bisnis yang melibatkan KUMKM di Bali.

Isu strategis yang terkait dengan upaya pencapaian TPB/SDGs meliputi 1 Tujuan 1 Target dan 1 Indikator TPB/SDGs yang relevan dengan pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali dalam rangka pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs sebagaimana tercantum dalam Tabel berikut:

Tabel 2.12. Tujuan, Target, dan Indikator TPB/SDGs Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali

No.	Tujuan	Target	Indikator
1.	Tujuan TPB/FDGs No.8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi - Mendorong pertumbuhan ekonomi yang terus-menerus, inklusif, dan berkelanjutan, serta kesempatan kerja penuh, produktif dan pekerjaan yang layak bagi semua orang	1. Menggalakkan kebijakan pembangunan yang mendukung kegiatan produktif, penciptaan lapangan kerja layak, kewirausahaan, kreativitas dan inovasi, dan mendorong formalisasi dan pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah termasuk melalui akses terhadap jasa keuangan	1. Persentase akses umkm (usaha mikro, kecil, dan menengah) ke layanan keuangan

Adapun Isu-isu yang berkembang berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

- a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola yang menyebabkan koperasi tidak mampu bersaing dengan lembaga keuangan lainnya
- b. Rendahnya pertumbuhan Koperasi dan UKM sebagai akibat dari rendahnya jiwa kewirausahaan masyarakat Bali yang masih beranggapan lebih baik mencari kerja daripada menciptakan lapangan pekerjaan
- c. Kurangnya Koperasi dan UKM yang mendapat akses permodalan yang menyebabkan kesulitan dalam pengembangan usaha
- d. Terbatasnya pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM sehingga peluang pengembangan usaha dan inovasi produk menjadi kecil yang mengakibatkan Koperasi dan UKM jalan di tempat.

Dari isu strategis tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Tingkat kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali telah mampu mengatasi hal yang kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat daerah yaitu :
 - Meningkatkan jumlah koperasi yang sehat dengan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap koperasi
 - Meningkatkan penumbuhan dan pengembangan KUKM dengan melaksanakan penyuluhan perkoperasian, bimtek/diklat perkoperasian dan kewirausahaan serta peningkatan akses informasi mengenai permodalan, pemasaran produk hasil Koperasi dan UKM.
 - Meningkatkan dalam memfasilitasi akses permodalan dan fasilitasi pameran dalam kemitraan usaha dengan BUMD/BUMN.
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah adalah :
 - Belum optimalnya kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan koperasi.
 - Terbatasnya kemampuan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) untuk menjangkau pasar terutama dalam promosi produk,

akses permodalan/pembiayaan, akses informasi pasar dan jaringan pemasaran.

- Belum optimalnya data yang lengkap dan valid mengenai perkembangan KUKM sehingga menyulitkan pemetaan dan pembinaan.
- Rendahnya pendidikan, keterampilan dan pengalaman, serta akses informasi para pelaku UKM. Sebagian besar UKM belum memiliki kapasitas kewirausahaan yang memadai. Hal ini tampak dari pola bisnis UKM yang masih banyak difokuskan pada produksi bukan permintaan pasar.
- Rendahnya pertumbuhan usaha dan daya saing UMKM.

3) Dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*) : Program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2019 yang memiliki catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program tahun yang direncanakan, sehingga ada beberapa program prioritas di tahun 2019 dalam upaya memberikan kontribusi yang berarti dalam membuka lapangan kerja, penanggulangan kemiskinan serta memegang peran strategis dalam kegiatan perekonomian dalam rangka mewujudkan ketahanan ekonomi daerah yang berdampak di berbagai sektor, yaitu :

- Program Pengembangan Pendukung Usaha bagi Koperasi, Usaha Kecil Menengah yang berdampak langsung kepada Koperasi dan UMKM untuk mendapatkan penguatan modal untuk usahanya yaitu adanya dana penguatan modal yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali yaitu Lembaga Penjaminan Kredit Bali Mandara.
- Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi yang merupakan indikator keberhasilan dalam pemberdayaan koperasi yang berkualitas sehat akan menambah kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan mendorong pembentukan koperasi sektor riil.
- Program Peningkatan Kuantitas Kelembagaan Koperasi dengan tumbuhnya wirausaha muda/baru diberbagai sektor koperasi dan UMKM.

- Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dengan program ini telah terwujudnya kemitraan KUKM serta SDM pengelola Koperasi yang berkualitas.
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah :

Koperasi dan UKM dapat disebut sebagai gambaran pondasi dasar ekonomi bangsa Indonesia karena mempunyai dasar azas kekeluargaan, akan tetapi kondisi saat ini tidak mudah menjalankan kegiatan perkoperasian di Indonesia. Lingkungan dihadapi koperasi pun beragam pada era globalisasi ini yang kemudian dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu analisis internal dan analisis eksternal.

a. Analisis Internal

- Kekuatan (*strength*)

- Adanya Peraturan Perundang-undangan dibidang Perkoperasian dan UKM.
- Bali sebagai Provinsi Penggerak Koperasi menunjukkan bahwa koperasi memegang peranan yang penting dalam meningkatkan perekonomian daerah.

- Kelemahan (*Weakness*)

- Kualitas SDM pengelola koperasi masih rendah.
- Akses permodalan Koperasi dan UKM masih kurang.
- Pemasaran produk dan kemitraan Koperasi dan UKM terbatas.
- Masih tingginya orientasi pendirian Koperasi Simpan Pinjam

b. Analisis Eksternal

- Peluang (*Oppurtunity*)

- Adanya pelatihan manajemen Pengelolaan Koperasi dan UMKM.
- Adanya fasilitasi/sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan/pembiayaan.
- Adanya fasilitasi pengembangan jaringan/kemitraan usaha dan promosi produk unggulan koperasi.

- **Ancaman (*Treath*)**
 - Adanya kasus-kasus koperasi dan koperasi tidak aktif.
 - Adanya gangguan dari para tengkulak.
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan :
- Program dan kegiatan direncanakan/disusun berdasarkan permasalahan dan isu strategis yang terjadi.
 - Program dan kegiatan disusun disesuaikan dengan kesanggupan APBD Daerah.
 - Penyesuaian indikator kinerja program sesuai hasil kinerja yang diinginkan.

2.4. Review terhadap Rancangan Renja

Rancangan Awal Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali terdapat 7 (tujuh) program dan 30 (tiga puluh) kegiatan untuk Dinas dan 1 (satu) program dengan 15 (lima belas) kegiatan untuk UPTD, dan setelah dilakukan pemetaan program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang disertai kebutuhan pendanaan maka Rancangan Akhir Rencana Kerja 2021 terdapat 7 (tujuh) program dan 16 (enam belas) kegiatan untuk Dinas; 1 (satu) program dengan 3 (tiga) kegiatan untuk UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Rancangan Akhir Rencana Kerja 2021 terdapat perubahan dengan Kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan makanan dan minuman, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah, Upacara keagamaan, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor, Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas, Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan gedung kantor, Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor, Penyusunan, Perencanaan, dan Pelaporan Capaian Kinerja, Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Koordinasi (kegiatan bersifat rutin) baik di Dinas maupun di UPTD menjadi kegiatan Administrasi Umum.

Berikut adalah tabel review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2021 (Tabel 2.8.).

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam Forum Perangkat Daerah Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2020 yang dilaksanakan pada bulan Pebruari 2020, ada beberapa usulan masyarakat yang perlu ditelaah. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dapat diuraikan sebagai berikut : hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan Provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari perangkat daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten maupun yang diusulkan ke Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan sebagai berikut:

1. Usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh secara lisan maupun tertulis dimasukan dalam daftar panjang;
2. Oleh Tim Penyusun Renja disusun sesuai dengan skala prioritas yang nantinya akan dibahas dalam Musrenbang menjadi daftar pendek.

Tabel 2.13.
Usulan Program/Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2021 Provinsi Bali

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kegiatan Peningkatan Akses Permodalan bagi pelaku Koperasi dan UMKM	-	-	-	-
2.	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi yang bergerak dibidang Sektor Riil	-	-	-	-
3.	Kegiatan Diklat Peningkatan Digitalisasi Koperasi dan Database Koperasi	-	-	-	-
4.	Kegiatan Peningkatan Kemitraan antar Koperasi Lintas Daerah	-	-	-	-

5.	Kegiatan Peningkatan Akses Perizinan UMKM Unud dan Pertanian	-	-	-	-
6.	Kegiatan Penumbuhan dan Pengembangan UMKM bagi Pengusaha Pemula Kabupaten Buleleng	-	-	-	-
7.	Program Peningkatan Pengawasan dengan Melibatkan Stakeholder Koperasi	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Tahun 2018 berakhir masa berlakunya RPJMD Provinsi Bali 2013-2018, oleh karena itu penyusunan tujuan dan sasaran diperlukan Rancangan Renstra Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali yang mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Bali 2018-2023 Selanjutnya Bab III Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan hal-hal sebagai berikut : 1) Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, 2) Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, dan 3) Program dan Kegiatan.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Sasaran Pembangunan Nasional periode 2020-2024 Visi dan Misi Kementerian Koperasi dan UKM RI periode 2020-2024 sebagai berikut:

Visi : “Terwujudkan Koperasi modern dan UMKM naik kelas dalam mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong.

Misi : Kementerian Koperasi dan UKM melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden ke-2 (struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing):

Tujuan :

- Modernisasi Koperasi
- Melahirkan entrepreneur baru
- Integrasi UMKM dalam *Global Value Chain* (GVC)
- *Scaling Up* UMKM

Terkait dengan arah kebijakan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk meningkatkan daya saing UMKM dan Koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar (naik kelas) dalam rangka mendukung kemandirian perekonomian nasional serta prioritas pembangunan nasional dan terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali serta isu strategis yang berkembang, maka ada beberapa hal yang menjadi prioritas pembangunan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sehingga ada keterpaduan antara

prioritas pembangunan Kementerian dengan Dinas menjawab dengan program unggulan yaitu :

- a. Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
- b. Program Pengembangan Kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani
- c. Program Peningkatan Pengawasan Koperasi
- d. Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi
- e. Program Pengembangan Koperasi Pengerajin Tenun
- f. Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
- g. Program Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang dimiliki oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tidak terlepas dari visi, misi Pemerintah Republik Indonesia, cita-cita dan acuan pengelolaan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah melalui Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, visi misi Gubernur Provinsi Bali beserta program-program yang dijanjikannya selama 5 (lima) tahun ke depan.

Adapun tujuan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) adalah meningkatkan kinerja dan daya saing Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) sehingga mampu tumbuh menjadi usaha yang berkelanjutan dengan skala yang lebih besar dalam rangka kemandirian perekonomian daerah dengan indikator Persentase Kontribusi KUMKM terhadap PDRB Bali.

Berdasarkan tujuan di atas, dikembangkanlah 2 (dua) sasaran beserta indikator yaitu :

- a. Sasaran 1 : Terwujudnya tata kelola organisasi dan kinerja Koperasi yang profesional dan akuntabel

Indikator : 1. Persentase peningkatan produktivitas koperasi

- b. Sasaran 2 : Meningkatnya wirausaha dari pelaku UMKM yang tangguh dan mandiri

Indikator : 1. Persentase Peningkatan Kelas Usaha UMKM

3.3. Program dan Kegiatan

Untuk mencapai sasaran, dikembangkan program dan kegiatan. Adapun Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Provinsi Bali setelah dilakukan analisis sesuai dengan kemampuan keuangan serta kebutuhan program dan kegiatan dengan menyesuaikan pagu indikatif yang diberikan kepada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebagai berikut :

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Provinsi Bali Tahun 2021

No	Program/Kegiatan
I	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja
1	Administrasi Umum
2	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
II	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi
1	Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi
2	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi
3	Pemuktahiran Data Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian
III	Program Pengembangan Kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani
1	Pengembangan Koperasi Subak
IV	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi
1	Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi
2	Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi
3	Penilaian Kesehatan Koperasi
V	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi
1	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha
2	Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi
3	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi
VI	Program Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun
1	Pemberdayaan Koperasi Tenun
VII	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
1	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
2	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3	Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM
VIII	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM
1	Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM
2	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM
3	Administrasi Umum
	JUMLAH PROGRAM : 8 (1 program rutin, 7 program prioritas)
	JUMLAH KEGIATAN : 19

Berdasarkan tabel di atas Program Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 berjumlah 8 (delapan) dengan kegiatan berjumlah 19 (sembilan belas).

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Pada Bab IV tentang Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali diuraikan tentang rencana kerja dan kebutuhan dengan pendanaan mengacu pada Renstra dan sesuai dengan kebutuhan.

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali tahun 2021 seperti terlampir dengan nominal pagu indikatif sebesar Rp10.776.513.378,00 (sepuluh milyar tujuh ratus tujuh puluh enam juta lima ratus tiga belas ribu tiga ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan rincian pagu indikatif untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali sebesar Rp9.635.439.457,00 (sembilan milyar enam ratus tiga puluh lima juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah); UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebesar Rp1.141.073.921,00 (satu milyar seratus empat puluh satu juta tujuh puluh tiga ribu Sembilan ratus dua puluh satu rupiah).

Pada tahap Kebijakan Umum dan Prioritas Plaffon Anggaran Sementara Total Pagu Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp. 21.204.865.039 (dua puluh satu milyar dua ratus empat juta delapan ratus enam puluh lima ribu tiga puluh sembilan rupiah) terdiri dari belanja operasi Rp. 21.036.968.039 (dua puluh satu milyar tiga puluh enam juta Sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga puluh Sembilan rupiah) dan belanja modal Rp. 167.897.000 (serratus enam puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).

BAB V PENUTUP

Demikian Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 yang disusun dengan mengacu pada sasaran dan prioritas pembangunan daerah, program dan kegiatan, indikator dan target kinerja serta pagu indikatif sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2021. Dalam pelaksanaan tahun berjalan Renja Tahun 2021 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan hal-hal sebagaimana tercantum dalam RKPD Tahun 2021, akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian dalam bentuk Renja Perubahan dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yang menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, ditetapkan kaidah-kaidah melaksanakan sebagai berikut :

- a. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan Renja Tahun 2021 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya, menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- b. Dalam rangka efektivitas pelaksanaannya akan dilakukan pemantauan dan evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Tahun 2021.
- c. Partisipasi masyarakat dalam hal ini pelaku Koperasi dan UKM serta stakeholder (asosiasi, perguruan tinggi, lembaga keuangan) dalam

proses penyusunan program dan kegiatan melalui Forum Penyelenggaraan Perangkat Daerah ditujukan untuk mengakomodasi aspirasi dan kepentingan pelaku Koperasi dan UKM.

- d. Dalam upaya sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan prioritas dan sasaran pembangunan yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD harus membuat Rencana Kerja (Renja) yang menggambarkan sinergitas program/kegiatan sesuai dengan sumber anggaran.
2. Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021 dengan beberapa perubahan antara lain :
 - a. Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali terdapat 7 (tujuh) program, 16 (enam belas) kegiatan, dan 46 (empat puluh enam) subkegiatan untuk Dinas dan 1 (satu) program dengan 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) subkegiatan untuk UPTD, dan setelah dilakukan penyederhanaan kegiatan pada Sekretariat melalui Program Akuntabilitas Capaian Kinerja yang sebelumnya terdiri dari 15 (lima belas) kegiatan menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Administrasi Umum, Kegiatan Perencanaan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dan Administrasi Keuangan.
3. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Tahun 2021, maka akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021 dengan berpedoman pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Tabel 2.6
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2019 (tahun berjalan)*
Provinsi Bali

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun (n-1)	Perkiraan realisasi Capaian Target Renstra Perangkat daerah s/d Tahun Berjalan	
								Target Renja Perangkat daerah (n-2)	Realisasi Renja Perangkat daerah (n-2)	Tingkat realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (n-1)	Tingkat Capaian realisasi Target renstra (%)
1				2	3	4	5	6	7	8=(7/6)*100%	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
-				Urusan Pilihan									
-	01			Koperasi dan UKM									
				Program Peningkatan Pengawasan Koperasi	Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	99 unit		210 unit	210 unit	100%	118 koperasi		
				Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya		64 unit	135 unit	135 unit	100%	140 KSP/USP Koperasi		
				Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi	Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi			50 unit	50 unit	100%	52 koperasi		
				Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang mematuhi peraturan Koperasi		9 unit	25 unit	25 unit	100%	28 koperasi		
				Penguatan Kelembagaan Koperasi	Jumlah kelompok masyarakat/anggota koperasi yang mendapat penyuluhan dan jumlah koperasi yang ijinnya diverifikasi			50 unit	50 unit	100%	58		
				Penyusunan Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan	Terlaksananya pemutakhiran data koperasi		45 unit	20 unit	20 unit	100%	1 database		

				Perkoperasian								
				Penyuluhan dan Pengembangan Koperasi	Penumbuhan dan pengembangan koperasi			17 unit	17 unit	100%	19 koperasi	
				Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Peningkatan kinerja kelembagaan dan usaha koperasi	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100%	15 koperasi	
				Pengembangan Kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani	Jumlah subak sebagai koperasi tani						1 koperasi	
				Pengembangan Koperasi Subak	Jumlah subak yang mengikuti sosialisasi perkoperasian						8 subak	
				Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta			104 unit	104 unit	100%	104 koperasi	
				Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi	Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan		50 unit	50 unit	50 unit	100%	50 koperasi	
				Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	Jumlah koperasi yang bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta		50 unit	50 unit	50 unit	100%	50 koperasi	
				Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal			4 unit	4 unit	100%	4 koperasi	
				Program Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun	Jumlah koperasi tenun yang aktif						1	
				Pemberdayaan Koperasi Tenun	Jumlah peserta yang bimtek tenun						30 orang	
				Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Koperasi usaha Kecil Menengah	Jumlah UMKM yang bermitra dengan lembaga bisnis lainnya dan jumlah KUMKM yang mendapat pendampingan konsultan			204 UMKM	204 UMKM	100%	180 UMKM	
				Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha		70 unit	50 UMKM	50 UMKM	100%	50 UMKM	
				Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah UMKM yang melakukan kemitraan dan difasilitasi pameran		40 unit	104 UMKM	104 UMKM	100%	89 UMKM	
				Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan sosialisasi dan pembinaan			25 UMKM	25 UMKM	100%	25 UMKM	

				Peningkatan Akses Pembiayaan UMKM	Jumlah UMKM yang mendapat akses pembiayaan	30 unit	25 UMKM	25 UMKM	100%			
				Peningkatan Kompetensi SDM KUKM	Jumlah SDM KUKM yang berkompeten		50 KUKM	50 KUKM	100%	50 orang		
				Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM		50 KUKM	50 KUKM	100%	25 KUKM		
				Diklat Peningkatan Kapasitas Koperasi dan UKM	Jumlah pengurus, pengawas, dan pengelola KUKM yang mengikuti diklat peningkatan kapasitas koperasi dan UKM		1.470 orang	1.470 orang	100%	1.230 orang		

Tabel 2.8
Review terhadap Ranwal Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021

No	Renja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (000)	Program / Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja		Nilai Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjiP)	83,00	3.503.267.360,00	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja	83,00	9.635.439.457,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah materai yang disediakan	350 lembar	1.509.000,00	Administrasi Umum	Provinsi Bali	Jumlah layanan administasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		3.314.319.076,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik	3 jenis	271.200.000,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Provinsi Bali	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu	3 dokumen	188.948.284,00	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Denpasar	Jumlah jenis alat tulis kantor	40 jenis	66.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	2 jenis	21.850.000,00	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah jenis instalasi listrik	20 jenis	15.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Denpasar	Jumlah jenis bahan bacaan	7 jenis	36.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Denpasar	Jumlah jenis makanan dan minuman	2 jenis	16.337.500,00	-	-	-	-	-	
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar dan Dalam Daerah	Denpasar	Jumlah jenis perjalanan dinas	2 jenis	392.062.600,00	-	-	-	-	-	
	Upacara Keagamaan	Denpasar	Jumlah jenis upacara keagamaan	18 jenis	92.659.944,00	-	-	-	-	-	
	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Denpasar	Jumlah jenis pengadaan peralatan gedung kantor	3 jenis	911.245.226,00	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	Denpasar	Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor	2 jenis	40.250.000,00	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Denpasar	Jumlah jenis pemeliharaan gedung kantor	3 jenis	750.204.806,00	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Denpasar	Jumlah jenis kendaraan dinas	2 jenis	700.000.000,00	-	-	-	-	-	

	Kendaraan Dinas										
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Denpasar	Jumlah gedung kantor yang direhab	-	-	-	-	-	-	-	-
	Penyusunan, Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	Denpasar	Jumlah dokumen perencanaan	2 dokumen	119.948.284,00	-	-	-	-	-	-
	Monitoring, Evaluasi, Pelaporan dan Koordinasi	9 Kab/Kota, Luar daerah	Laporan hasil monev program/kegiatan Koperasi dan UKM	1 dokumen	69.000.000,00	-	-	-	-	-	-
	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi		Jumlah Koperasi yang sehat dan berkualitas	130	569.153.976,00	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi		Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas	130	569.153.976,00	
	Penilaian Kesehatan Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah KSP/USP koperasi yang dinilai kesehatannya	130 KSP/USP Koperasi	196.400.492,00	Penilaian Kesehatan Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya	130 KSP/USP Koperasi	196.400.492,00	
	Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi	55 Koperasi	190.413.992,00	Peningkatan Kepatuhan dan Penerapan Sanksi Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi	55 koperasi	190.413.992,00	
	Pemeriksaan Kelembagaan Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	30 Koperasi	182.339.492,00	Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya	30 koperasi	182.339.492,00	
	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi		Jumlah koperasi yang bankable	64	1.860.600.000,00	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi		Jumlah koperasi yang bankable	64	1.860.600.000,00	
	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan	30 koperasi	660.000.000,00	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan	30 koperasi	660.000.000,00	
	Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah petugas (PPKL) yang mendapat peningkatan kapasitas	32 orang	660.600.000,00	Penumbuhan dan Pengembangan Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah petugas (PPKL) yang mendapat peningkatan kapasitas	32 orang	660.000.000,00	
	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	14 koperasi	540.000.000,00	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai	14 koperasi	540.000.000,00	
	Program Pengembangan Kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani		Jumlah subak sebagai koperasi tani	1	500.000.000,00	Program Pengembangan Kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani		Jumlah subak sebagai koperasi tani	1	500.000.000,00	
	Pengembangan Koperasi Subak	Provinsi Bali	Jumlah subak yang mengikuti sosialisasi perkoperasian -	1 subak	500.000.000,00	Pengembangan Koperasi Subak	Prov. Bali	Jumlah subak yang mengikuti sosialisasi perkoperasian	1 subak	500.000.000,00	
	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi		Jumlah Koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	126	525.843.419,00	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta	126	525.843.419,00	
	Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi	9 Kab/kota	Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	60 koperasi	130.586.892,00	Peningkatan Akses Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan	60 koperasi	130.586.892,00	
	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti temu kemitraan	60 koperasi	130.000.000,00	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang mengikuti temu kemitraan	60 koperasi	130.000.000,00	
	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	6 koperasi	265.256.527,00	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk	9 Kab/Kota	Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal	6 koperasi	265.256.527,00	

	Unggulan Koperasi					Unggulan Koperasi					
	Program Pengembangan Koperasi Pengerajin Tenun		Jumlah koperasi tenun yang aktif	1	800.000.000,00	Program Pengembangan Koperasi Pengerajin Tenun		Jumlah koperasi tenun yang aktif	1	800.000.000,00	
	Pemberdayaan Koperasi Tenun	9 Kab/Kota	Jumlah peserta yang bimtek tenun	30 orang	800.000.000,00	Pemberdayaan Koperasi Tenun	9 Kab/Kota	Jumlah peserta yang bimtek tenun	30 orang	800.000.000,00	
	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah		Jumlah UMKM yang bankable	185	1.876.574.702,00	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah		Jumlah UMKM yang bankable	185	1.876.574.702,00	
	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9 kab/Kota	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	50 UMKM	382.574.702,00	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9 Kab/Kota	Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha	50 UMKM	382.574.702,00	
	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9 kab/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan kesepakatan/kerjasama	300 UMKM	1.252.000.000,00	Pengembangan Pemasaran Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	9 Kab/Kota	Jumlah UMKM yang melakukan kesepakatan/kerjasama	300 UMKM	1.252.000.000,00	
	Peningkatan Akses Perizinan dan Pembinaan UMKM	9 Kab/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha	25 UMKM	242.000.000,00	Peningkatan Akses Perizinan dan Pembinaan UMKM	9 Kab/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha	25 UMKM	242.000.000,00	
	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM		Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikat	50	1.141.073.921,00	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUMKM		Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikasi	50	1.141.073.921,00	
						Administrasi Umum	Provinsi Bali	Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	11 layanan	432.586.058,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Denpasar	Jumlah materai	80 lembar	1.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Denpasar	Jumlah jenis jasa komunikasi, air dan listrik	3 jenis	35.200.000,00	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Denpasar	Jumlah jenis ATK	30 jenis	4.400.000,00	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Denpasar	Jumlah lembar foto copy	6.500 lembar	2.200.000,00	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Denpasar	Jumlah jenis instalasi listrik	12 jenis	2.500.000,00	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Denpasar	Jumlah jenis bahan bacaan	2 jenis	924.000,00	-	-	-	-	-	
	Penyediaan Makanan dan Minuman	Denpasar	Jumlah jenis makanan dan minuman	2 jenis	3.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Upacara Keagamaan	Denpasar	Jumlah jenis upacara keagamaan	5 jenis	51.435.644,00	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Denpasar	Jumlah jenis jasa pemeliharaan gedung kantor dan jasa keamanan	3 jenis	248.926.414,00	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas	Denpasar	Jumlah jenis kendaraan dinas yang dipelihara	2 jenis	75.000.000,00	-	-	-	-	-	
	Pemeliharaan Rutin/Berkala	Denpasar	Jumlah jenis peralatan dan	4 jenis	8.000.000,00	-	-	-	-	-	

	Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor		perlengkapan kantor yang dipelihara								
	Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM	Denpasar	Laporan rapat konsolidasi dan penyusunan program diklat SDM KUMKM	1 dokumen	16.500.000,00	Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM	Denpasar	Laporan rapat konsolidasi dan penyusunan program diklat SDM KUMKM	1 Dokumen	16.500.000,00	
	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM	Denpasar	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM	50 KUKM	691.987.863,00	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM	Denpasar	Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM	50 KUKM	691.987.863,00	

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tahun 2021
dan Perkiraan Maju Tahun 2022 Provinsi Bali

Organisasi/Sub PD : 2.11.01.01 – Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Rencana Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				9.635.439.457,00			10.372.662.380,00
2.11.2.11.01.01.01.	Program Peningkatan Akuntabilitas Capaian Kinerja				3.503.267.360,00			3.896.872.354,00
		Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja		83,00	3.503.267.360,00		83,50	3.896.872.354,00
2.11.2.11.01.01.01.79.	Administrasi Umum	Masukan : Jumlah Dana	Provinsi Bali		3.314.319.076,00			3.707.924.070,00
		Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu		13 layanan			13 layanan	
		Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran		100%				
2.11.2.11.01.01.01.80.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Masukan : Jumlah Dana	Provinsi Bali		188.948.284,00			188.948.284,00
		Keluaran : Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja OPD yang disusun dan disampaikan tepat waktu		3 dokumen			3 dokumen	
		Hasil : Nilai akuntabilitas kinerja perangkat daerah		A				
2.11.2.11.01.01.02.	Program Penguatan Kelembagaan Koperasi				1.860.600.000,00			2.015.650.000,00
		Jumlah koperasi yang bankable		64	1.860.600.000,00		71	2.015.650.000,00
2.11.2.11.01.01.02.01.	Penumbuhan dan	Masukan : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		660.600.000,00			695.650.000,00

	Pengembangan Koperasi	Keluaran : Jumlah petugas (PPKL) yang mendapat peningkatan kapasitas		32 orang			22	
		Hasil : Peningkatan jumlah kelompok usaha bersama pra koperasi yang membentuk koperasi		20 koperasi				
2.11.2.11.01.01.02.02.	Peningkatan Kinerja Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Masukan : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		540.000.000,00			594.000.000,00
		Keluaran : Jumlah koperasi berprestasi yang dinilai		14 koperasi			19	
		Hasil : Peningkatan jumlah koperasi yang berkinerja dengan baik		14 koperasi				
2.11.2.11.01.01.02.03.	Pemutakhiran Data Sistem Informasi Perencanaan Pengembangan Perkoperasian	Masukan : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		660.000.000,00			726.000.000,00
		Keluaran : Jumlah koperasi yang datanya dimutakhirkan		30 koperasi			30	
		Hasil : Database koperasi terupdate		1 database				
2.11.2.11.01.01.03.	Program Pengembangan Kelembagaan Subak sebagai Koperasi Tani				500.000.000,00			500.000.000,00
		Jumlah subak sebagai koperasi tani		1	500.000.000,00		1	500.000.000,00
2.11.2.11.01.01.03.01.	Pengembangan Koperasi Subak	Masukan : Jumlah Dana	Provinsi Bali		500.000.000,00			500.000.000,00
		Keluaran : Jumlah subak yang mengikuti sosialisasi perkoperasian		1 subak			1	
		Hasil : Terbentuknya koperasi subak yang aktif		1 koperasi				
2.11.2.11.01.01.04.	Program Peningkatan Pengawasan Koperasi				569.153.976,00			490.140.026,00
		Jumlah koperasi yang sehat dan berkualitas		130	569.153.976,00		142	490.140.026,00
2.11.2.11.01.01.04.01.	Peningkatan Kepatuhan dan	Masukan : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		190.413.992,00			143.000.000,00

	Penerapan Sanksi Koperasi	Keluaran : Jumlah koperasi yang menerapkan kepatuhan dan penerapan sanksi koperasi		55 Koperasi			57	
		Hasil : Meningkatnya koperasi yang melaksanakan peraturan perkoperasian		55 Koperasi				
2.11.2.11.01.01.04.02.	Pemeriksaan Kelembagaan dan Usaha Koperasi	Masukan : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		182.339.492,00			132.000.000,00
		Keluaran : Jumlah koperasi yang diperiksa kelembagaan dan usahanya		30 Koperasi			33	
		Hasil : Peningkatan jumlah koperasi yang akuntabel		30 Koperasi				
2.11.2.11.01.01.04.03.	Penilaian Kesehatan Koperasi	Masukan : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		196.400.492,00			215.140.026,00
		Keluaran : Jumlah KSP/USP Koperasi yang dinilai kesehatannya		130 KSP/USP Koperasi			142	
		Hasil : Meningkatnya jumlah koperasi yang sehat dan berprestasi		130 KSP/USP Koperasi				
2.11.2.11.01.01.05.	Program Pengembangan dan Penciptaan Iklim Usaha Koperasi				525.843.419,00			750.000.000,00
		Jumlah koperasi yang mendapat pembiayaan dan bermitra dengan BUMN, BUMD/Swasta		126	525.843.419,00		126	750.000.000,00
2.11.2.11.01.01.05.01.	Kemitraan Koperasi di Bidang Produksi dan Aneka Usaha	Masukan : Jumlah Dana	9 Kabupaten/kota		130.000.000,00			200.000.000,00
		Keluaran : Jumlah koperasi yang mengikuti temu kemitraan		60 Koperasi			60	
		Hasil : Meningkatnya jumlah koperasi yang bermitra dengan BUMN/BUMD/Swasta		60 Koperasi				
2.11.2.11.01.01.05.02.	Peningkatan Akses	Masukan : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		130.586.892,00			200.000.000,00

	Penyediaan Permodalan/Pembiayaan dan Sarana Prasarana Koperasi	Keluaran : Jumlah koperasi yang memperoleh program perkuatan permodalan/pembiayaan		60 Koperasi			60	
		Hasil : Meningkatnya jumlah koperasi yang memperoleh permodalan		60 Koperasi				
2.11.2.11.01.01.05.04.	Pengembangan Jaringan Usaha dan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi	Masukan : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		265.256.527,00			350.000.000,00
		Keluaran : Jumlah koperasi yang produk unggulannya dikenal		6 Koperasi			6	
		Hasil : Meningkatnya jumlah produk unggulan koperasi		6 Koperasi				
2.11.2.11.01.01.06.	Program Pengembangan Koperasi Pengrajin Tenun				800.000.000,00			800.000.000,00
		Jumlah koperasi tenun yang aktif		1	800.000.000,00		1	800.000.000,00
2.11.2.11.01.01.06.01.	Pemberdayaan Koperasi Tenun	Masukan : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		800.000.000,00			800.000.000,00
		Keluaran : Jumlah peserta yang bimtek tenun		30 Orang			1	
		Hasil : Meningkatnya koperasi tenun yang aktif		1 Koperasi				
2.11.2.11.01.01.07.	Program Penciptaan Iklim Usaha dan Pengembangan Kewirausahaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah				1.876.574.702,00			1.920.000.000,00
		Jumlah UMKM yang bankable		185	531.513.976,00		185	1.920.000.000,00
2.11.2.11.01.01.07.01.	Penumbuhan dan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Masukan : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		382.574.702,00			314.600.000,00
		Keluaran : Jumlah pembekalan kewirausahaan bagi calon wirausaha		50 UMKM			50	
		Hasil : Meningkatnya jumlah UMKM yang bankable		50 UMKM				
2.11.2.11.01.01.07.02.	Pengembangan Pemasaran	Masukan : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		1.252.000.000,00			1.339.200.000,00

	Produk dan Peningkatan Kemitraan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Keluaran : Jumlah UMKM yang melakukan kesepakatan/kerjasama		300 UMKM			350	
		Hasil : Meningkatnya jumlah UMKM yang bankable		300 UMKM				
2.11.2.11.01.01.07.04.	Peningkatan Akses Perijinan dan Pembinaan UMKM	Masukan : Jumlah Dana	9 kabupaten/kota		242.000.000,00			266.200.000,00
		Keluaran : Jumlah UMKM yang memperoleh ijin usaha		25 UMKM			25	
		Hasil : Meningkatnya jumlah UMKM yang bankable		25 UMKM				
	TOTAL				9.635.439.457,00			10.372.662.380,00

**Tabel Lanjutan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Dan Perkiraan Maju Tahun 2022**

Organisasi/Sub PD : 2.11.01.02 – UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan	Tahun 2021			Catatan Penting	Perkiraan Maju Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.11.	KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				1.141.073.921,00			1.220.365.933,00
2.11.2.11.01.02.08.	Program Peningkatan Kompetensi SDM KUKM				1.141.073.921,00			1.220.365.933,00
		Jumlah pengelola KUMKM yang kompeten dan bersertifikasi		50	1.141.073.921,00		50	1.220.365.933,00
2.11.2.11.01.02.08.12.	Rapat Konsolidasi dan Penyusunan Program Diklat SDM KUMKM	Masukan : Jumlah Dana	Denpasar		16.500.000,00			18.150.000,00
		Keluaran : Laporan rapat konsolidasi dan penyusunan program diklat SDM KUMKM		1 dokumen			1 dokumen	
		Hasil : Data laporan program tahun 2021		1 dokumen				
2.11.2.11.01.02.08.13.	Diklat Manajemen Pengelolaan KUKM	Masukan : Jumlah Dana	Denpasar		691.987.863,00			765.869.533,00
		Keluaran : Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM		50 KUKM			50 KUKM	
		Hasil : Jumlah pengurus/pengelola KUKM yang mengikuti diklat pengelolaan KUKM		50 KUKM				
2.11.2.11.01.02.08.16.	Administrasi Umum	Masukan : Jumlah Dana	Provinsi Bali		432.586.058,00			436.346.400,00
		Keluaran : Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik		11 layanan			11 layanan	

		dan disampaikan tepat waktu						
		Hasil : Persentase layanan administrasi perkantoran		-				
	TOTAL				1.141.073.921,00			1.220.365.933,00



PEMERINTAH PROVINSI BALI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Raya Kapten Cok Agung Tresna Niti Mandala Renon, Denpasar - Bali (80235)

Telpon : (0361) 226974, Faks. (0361) 226491

Website : www.bappeda.baliprov.go.id

BERITA ACARA

**HASIL PEMETAAN PERMENDAGRI NOMOR 90 TAHUN 2019 TENTANG
KLASIFIKASI, KODEFIKASI DAN NOMENKLATUR PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN DAERAH DENGAN RPJMD/RENSTRA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2018-2023**

NOMOR : 050/2591/BPPE/Bappeda

Pada Hari Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bali telah diselesaikan Review Pemetaan Program/Kegiatan Perangkat Daerah sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dengan RPJMD/Renstra Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, untuk Perencanaan Pembangunan Tahun 2021.

Hasil pemetaan sebagaimana tercantum dalam LAMPIRAN Berita Acara, dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pemetaan yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Perda Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023, dan Pergub Nomor 43 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023;
2. Hasil Pemetaan ini telah menjamin konsistensi pencapaian indikator dan target sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Semesta Berencana Perangkat Daerah Tahun 2018-2023; dan
3. Hasil Pemetaan ini dijadikan sebagai lampiran dalam RKPD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 serta menjadi bahan acuan dalam Penyusunan KUA-PPAS Semesta Berencana Tahun 2021.

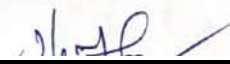
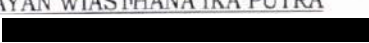
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 13 Juli 2020
Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil
Dan Menengah Provinsi Bali

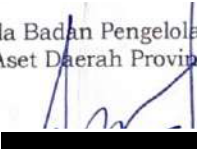

I WAYAN MARDIANA
NIP. 

Mengetahui,

Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Provinsi Bali


I WAYAN WASTHANA IKA PUTRA
NIP. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah Provinsi Bali


I DEWA PUTU SUNARTHA
NIP. 

TABEL KERJA

[illegible]

LAMPIRAN PROGRAM/KEGIATAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH PROVINSI BALI
TAHUN 2021

REKAPITULASI ANGGARAN BELANJA BERDASARKAN PROGRAM DAN KEGIATAN																					
Kode					Uraian	Sumber Dana	Lokasi	T-1	Jumlah						T+1						
									T												
									Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tidak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 = (10+11+12+13)		15						
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											21,036,968,039	167,897,000	0	0	21,204,865,039	
2	17	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											15,879,426,164	167,897,000	0	0	16,047,323,164	
2	17	1	01:01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											165,444,786	0	0	0	165,444,786	
2	17	1	01:01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		88,947,836	0	0	0	88,947,836								
							Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta														
2	17	1	01:01	2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		29,999,990	0	0	0	29,999,990								
							Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta														
2	17	1	01:01	3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,499,760	0	0	0	4,499,760								
							Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta														
2	17	1	01:01	4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,499,900	0	0	0	4,499,900								
							Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta														
2	17	1	01:01	5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		4,499,730	0	0	0	4,499,730								
							Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta														
2	17	1	01:01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,998,910	0	0	0	24,998,910								
							Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta														
2	17	1	01:01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		7,998,660	0	0	0	7,998,660								
							Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta														
2	17	1	01:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											10,811,287,094	0	0	0	10,811,287,094	
2	17	1	01:02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,814,019,388	0	0	0	1,814,019,388	
2	17	1	01:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		10,783,559,964	0	0	0	10,783,559,964								
2	17	1	01:02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		1,814,019,388	0	0	0	1,814,019,388								
2	17	1	01:02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		9,200,700	0	0	0	9,200,700								
2	17	1	01:02	6	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		3,935,310	0	0	0	3,935,310								
2	17	1	01:02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		14,591,120	0	0	0	14,591,120								

2	17	1	01:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				276,823,020	0	0	0	276,823,020	
2	17	1	01:06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				38,099,260	0	0	0	38,099,260	
2	17	1	01:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	14,985,850	0	0	0	14,985,850	
2	17	1	01:06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2,499,600	0	0	0	2,499,600	
2	17	1	01:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	64,997,170	0	0	0	64,997,170	
2	17	1	01:06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	7,399,860	0	0	0	7,399,860	
2	17	1	01:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	21,850,000	0	0	0	21,850,000	
2	17	1	01:06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	2,200,000	0	0	0	2,200,000	
2	17	1	01:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	7,000,000	0	0	0	7,000,000	
2	17	1	01:06	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
2	17	1	01:06	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	6,000,000	0	0	0	6,000,000	
2	17	1	01:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	161,990,000	0	0	0	161,990,000	
2	17	1	01:06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	24,999,800	0	0	0	24,999,800	
2	17	1	01:07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				1,020,000	167,897,000	0	0	168,917,000	
2	17	1	01:07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1,020,000	167,897,000	0	0	168,917,000	
2	17	1	01:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,297,634,752	0	0	0	1,297,634,752	
2	17	1	01:08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				279,970,892	0	0	0	279,970,892	
2	17	1	01:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	2,000,000	0	0	0	2,000,000	
2	17	1	01:08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	1,000,000	0	0	0	1,000,000	
2	17	1	01:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	271,200,000	0	0	0	271,200,000	
2	17	1	01:08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	48,500,000	0	0	0	48,500,000	
2	17	1	01:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta	1,024,434,752	0	0	0	1,024,434,752	
2	17	1	01:08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	230,470,892	0	0	0	230,470,892	
2	17	1	01:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1,012,411,628	0	0	0	1,012,411,628	
2	17	1	01:09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				182,715,344	0	0	0	182,715,344	

2	17	1	01:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		781,939,736	0	0	0	781,939,736	
2	17	1	01:09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		77,612,448	0	0	0	77,612,448	
2	17	1	01:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		50,000,000	0	0	0	50,000,000	
2	17	1	01:09	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		14,950,000	0	0	0	14,950,000	
2	17	1	01:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	Kota Denpasar, Denpasar Timur, Sumerta		180,471,892	0	0	0	180,471,892	
2	17	1	01:09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon		90,152,896	0	0	0	90,152,896	
2	17	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM				243,089,450	0	0	0	243,089,450	
2	17	2	01:01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah				218,089,650	0	0	0	218,089,650	
2	17	2	01:01	1	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		218,089,650	0	0	0	218,089,650	
2	17	2	01:02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk				24,999,800	0	0	0	24,999,800	
2	17	2	01:02	1	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		24,999,800	0	0	0	24,999,800	
2	17	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				209,952,106	0	0	0	209,952,106	
2	17	3	01:01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1				149,952,496	0	0	0	149,952,496	
2	17	3	01:01	1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesinambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77,476,148	0	0	0	77,476,148	

2	17	3	01:01	2	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		72,476,348	0	0	0	72,476,348	
2	17	3	01:02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah				59,999,610	0	0	0	59,999,610	
2	17	3	01:02	1	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		59,999,610	0	0	0	59,999,610	
2	17	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI				127,476,198	0	0	0	127,476,198	
2	17	4	01:01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas				127,476,198	0	0	0	127,476,198	
2	17	4	01:01	1	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		77,476,248	0	0	0	77,476,248	

					dan Kemandirian Koperasi		Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
							Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
							Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
							Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
2	17	4	01:01	2	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	49,999,950	0	0	0	49,999,950					
						Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
						Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
						Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
						Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
						Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
						Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
						Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
						Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan											
2	17	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN							3,392,755,626	0	0	0	3,392,755,626	
2	17	5	01:01		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)							3,392,755,626	0	0	0	3,392,755,626	
2	17	5	01:01	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kota Denpasar, Denpasar Selatan, Renon	3,392,755,626	0	0	0	3,392,755,626					
						DAK Non Fisik - PK2UKM											
2	17	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI							583,089,605	0	0	0	583,089,605	
2	17	6	01:01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu)							583,089,605	0	0	0	583,089,605	
2	17	6	01:01	1	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	337,853,639	0	0	0	337,853,639					
2	17	6	01:01	2	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Semua Kabupaten/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	245,235,966	0	0	0	245,235,966					
2	17	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)							601,178,890	0	0	0	601,178,890	
2	17	7	01:01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan							601,178,890	0	0	0	601,178,890	
							Kab. Badung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
							Kab. Bangli, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										
							Kab. Buleleng, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan										

2	17	7	01:01	1	Menumbuhkan/embangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Kab. Gianyar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan		601,178,890	0	0	0	601,178,890	
							Kab. Jembrana, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kab. Karangasem, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kab. Klungkung, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kab. Tabanan, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							
							Kota Denpasar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan							

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

Provinsi Bali

Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR													
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH											15,438,483,517	17,754,256,045	
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											13,673,269,793	15,724,260,263	
2	17	01	1.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah											188,948,284	217,290,527	
2	17	01	1.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perencanaan yang diselesaikan tepat waktu	3 dokumen			88,948,284	102,290,527	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2	17	01	1.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen rka-skpd	1 dokumen			30,000,000	34,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2	17	01	1.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan rka-skpd	1 dokumen			10,000,000	11,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2	17	01	1.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen dpa-skpd	1 dokumen			10,000,000	11,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2	17	01	1.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen perubahan dpa-skpd	1 dokumen			10,000,000	11,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2	17	01	1.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan capaian kinerja	1 laporan			30,000,000	34,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	1.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah program/kegiatan yang dievaluasi	48 program/kegiatan			10,000,000	11,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								10,751,375,764	12,364,082,129			
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen SPP/SPM gaji dan tunjangan ASN	14 dokumen			10,723,559,964	12,332,093,959	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen SPJ yang diverifikasi	12 dokumen			9,213,600	10,595,640	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.02	06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen tanggapan pemeriksaan	1 dokumen			3,997,200	4,596,780	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan			14,605,000	16,795,750	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah								357,850,000	411,527,500			
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			15,000,000	17,250,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			85,000,000	97,750,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			21,850,000	25,127,500	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			20,000,000	23,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			6,000,000	6,900,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			210,000,000	241,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah									280,000,000	322,000,000		
2	17	01	1.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			280,000,000	322,000,000	
2	17	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah									1,318,915,865	1,516,753,245		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			2,000,000	2,300,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			271,200,000	311,880,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			1,045,715,865	1,202,573,245	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										776,179,880	892,606,862	
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			525,707,928	604,564,117	
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			50,000,000	57,500,000	
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang di rehab	5 unit			200,471,952	230,542,745	
2	17	02			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM										243,089,940	279,553,431	
2	17	02	1.01		Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										218,089,940	250,803,431	
2	17	02	1.01	01	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha simpan pinjam	10 koperasi			218,089,940	250,803,431	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	02	1.02		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi										25,000,000	28,750,000	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah																		
Provinsi Bali																		
Tahun 2021																		
Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																		
Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan	
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional	
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target				
2	17	02	1.02	01	Fasilitasi Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk memperoleh izin usaha pembukaan kantor cabang	2 koperasi			25,000,000	28,750,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2	17	03			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI											210,235,976	241,771,372	
2	17	03	1.01		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											150,235,976	172,771,372	
2	17	03	1.01	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koperasi yang yang mematuhi perundang-undangan perkoperasian	30 koperasi			77,617,988	89,260,686		
2	17	03	1.01	02	Peningkatan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan dan Terbentuknya Koperasi yang Kuat, Sehat, Mandiri, Tangguh, serta Akuntabel	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koperasi yang akuntabel	25 koperasi			72,617,988	83,510,686		
2	17	03	1.02		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											60,000,000	69,000,000	
2	17	03	1.02	01	Meningkatkan Akuntabilitas, Kepercayaan, Kepatuhan, Kesenambungan, dan Memberikan Manfaat yang Sebesar-Besarnya ke pada Anggota dan Masyarakat	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KSP/USP yang akuntabel	35 KSP/USP-Koperasi			60,000,000	69,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2	17	04			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI											127,617,988	146,760,686	
2	17	04	1.01		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											127,617,988	146,760,686	
2	17	04	1.01	01	Penilaian Permodalan, Kualitas Aktiva Produktif, Manajemen, Efisiensi, Likuiditas, Jatidiri Koperasi, Pertumbuhan dan Kemandirian Koperasi	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KSP/USP yang tumbuh sehat dan mandiri	30 koperasi			77,617,988	89,260,686	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2	17	04	1.01	02	Mengukur Tingkat Kesehatan Koperasi	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah KSP/USP Nivo Provinsi yang sehat	30 koperasi			50,000,000	57,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	
2	17	06			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI											583,089,940	670,553,431	
2	17	06	1.01		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi											583,089,940	670,553,431	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	06	1.01	01	Perluasan Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi permodalan Jumlah koperasi nivo provinsi yang difasilitasi temu mitra	10 koperasi 10 koperasi			337,853,964	388,532,059	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	06	1.01	02	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah koperasi nivo provinsi yang baik kelembagaan dan meningkat aset dan omsetnya	10 koperasi			245,235,976	282,021,372	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	07			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)									601,179,880	691,356,862		
2	17	07	1.01		Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan									601,179,880	691,356,862		
2	17	07	1.01	01	Menumbuhkembangkan UMKM untuk menjadi Usaha yang Tangguh dan Mandiri sehingga dapat Meningkatkan Penciptaan Lapangan Kerja, Pemerataan Pendapatan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengentasan Kemiskinan	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peningkatan kelas UMKM	10 UMKM			601,179,880	691,356,862	
TOTAL															15,438,483,517	17,754,256,045	

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan		
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional		
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target					
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	17				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH										2,491,681,280	2,866,088,471			
2	17	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI										2,316,445,304	2,664,567,099			
2	17	01	1.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah dokumen SPP/SPM	14 dokumen			1,814,019,388	2,086,122,296	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		
2	17	01	1.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			2,500,000	3,000,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		
2	17	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			7,400,000	8,880,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		
2	17	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			2,200,000	2,640,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		
2	17	01	1.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			1,000,000	1,150,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		
2	17	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			25,000,000	28,750,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan		

Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Provinsi Bali
Tahun 2021

Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0000 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
Sub Unit Organisasi : 2.17.0.00.0.00.01.0001 UPTD Pendidikan dan Pelatihan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Lokasi	Indikator Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)	Prakiraan Maju (Rp.)	Keterangan
									Capaian Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan				Prioritas Pembangunan Nasional
									Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Target			
2	17	01	1.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			1,000,000	1,200,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			50,000,000	57,500,000	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			230,471,952	265,042,745	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	17	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			77,617,988	89,260,686	
2	17	01	1.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah layanan administrasi perkantoran yang selesai dengan baik dan disampaikan tepat waktu	1 layanan			15,000,000	17,250,000	
2	17	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah pemeliharaan gedung kantor atau bangunan lainnya yang di rehab	1 unit			90,235,976	103,771,372	
2	17	05			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN									175,235,976	201,521,372		
2	17	05	1.01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	1. Pangan, Sandang dan Papan		Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan			Jumlah peserta diklat yang memperoleh sertifikasi teknis dan sertifikat kompeten	25 Orang			175,235,976	201,521,372	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan
TOTAL															2,491,681,280	2,866,088,471	